




Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024: Pendekatan CIPP dalam Konteks Perlindungan Sosial di Indonesia

Istiana Hermawati^{1,2*} 

Risnandar³ 

Budi Trapsilo³ 

Ade Chandra⁴ 

¹ Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Indonesia

² Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia.

³ Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

⁴ Prodi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi: istiana1410@gmail.com; istiana.hermawati@apmd.ac.id (+62) 8528716070

Diterima: 3 Juli 2025; Disetujui: 9 Desember 2025; Diterbitkan: 19 Desember 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam kerangka perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 306 pelaksana program dari 12 provinsi dan 63 kabupaten/kota yang terlibat langsung dalam implementasi program. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen survei untuk menilai empat dimensi CIPP, yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Selain itu, analisis teks menggunakan pemodelan topik diterapkan untuk menggali kendala dan saran perbaikan dari pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara keseluruhan berjalan efektif dengan skor tertinggi pada dimensi produk (94%), yang mengindikasikan kualitas makanan dan kepuasan penerima manfaat. Namun, tantangan utama ditemukan pada dimensi proses, terutama terkait dengan pelaporan digital dan distribusi di daerah dengan medan sulit, dengan skor terendah pada variabel ini (81,1%). Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan pelatihan teknis bagi pelaksana, menyesuaikan indeks bantuan pangan dengan kondisi lokal, serta memperkuat sistem pelaporan dan logistik distribusi. Implikasi penelitian ini memberikan dasar empiris untuk peningkatan kebijakan bantuan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas di Indonesia.

Kata kunci: Bantuan Permakanan, Penyandang Disabilitas, Evaluasi Program, Model CIPP, Perlindungan Sosial

Abstract: This study aims to evaluate the implementation of the Food Assistance Program for Persons with Disabilities in 2024 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) within the social protection framework in Indonesia. The study involved 306 program implementers from 12 provinces and 63 districts/cities directly involved in the program's implementation. A descriptive quantitative approach with survey instruments was used to assess the four CIPP dimensions: context, input, process, and product. Additionally, topic modeling was applied for text analysis to identify challenges and suggestions for improvement from program implementers. The results show that the program is generally effective, with the highest score in the product dimension (94%), indicating the quality of food and beneficiary satisfaction. However, the main challenges were found in the process dimension, particularly related to digital reporting and distribution in areas with difficult terrain, with the lowest score in this dimension (81.1%). Based on these findings, it is recommended to enhance technical training for implementers, adjust food assistance indices according to local conditions, and strengthen the reporting and distribution logistics systems. The implications of this study provide an empirical basis for improving social assistance policies that are more inclusive and responsive to the needs of vulnerable groups, especially persons with disabilities in Indonesia.

Keywords: Food Assistance, Persons with Disabilities, Program Evaluation, CIPP Model, Social Protection

1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan menghadapi kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk kebutuhan pangan bergizi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 8,56% penduduk merupakan penyandang disabilitas, di mana mayoritas mengalami kerentanan sosial-ekonomi yang signifikan akibat hambatan struktural dan stigma sosial (Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, 2024; Groce et al., 2011). Pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016), Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2011) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB (*Convention on the Rights of Persons With Disabilities*, 2006). Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang memadai sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Banks et al., 2017).

Bantuan pangan bagi penyandang disabilitas merupakan komponen strategis dalam sistem perlindungan sosial, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan ekonomi kelompok rentan ini (Barrientos, 2013; Devereux, 2001). Perlindungan sosial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kerentanannya melalui jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal (Devereux & Sabates-Wheeler, 2015). Bantuan pangan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang juga berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan multidimensi (Côte, 2020).

Penelitian menunjukkan hubungan antara kecacatan dan kerawanan pangan, dengan penyandang disabilitas menghadapi risiko pangan lebih tinggi karena biaya hidup tambahan serta hambatan dalam inklusi sosial dan ekonomi (Hadfield-Spoor et al., 2022; Schuelke et al., 2022). Di Inggris, rumah tangga dengan anggota disabilitas mengalami biaya hidup lebih tinggi, yang melebihi transfer pemerintah, menyoroti perlunya kebijakan kesejahteraan yang disesuaikan. Sementara itu, di Kolombia, rumah tangga dengan anggota disabilitas lebih rentan terhadap kemiskinan multidimensi, termasuk kekurangan dalam pendidikan dan partisipasi sosial (Pinilla-Roncancio & Cedeño-Ocampo, 2023), serta di China, layanan ketenagakerjaan telah mengurangi kemiskinan multidimensi (Wang et al., 2023). Di Peru, populasi migran Venezuela menghadapi kesulitan pangan lebih tinggi akibat kecacatan, mempertegas dampak persimpangan kecacatan dan kerawanan pangan pada kelompok rentan (Hernández-Vásquez et al., 2023). Temuan ini menekankan perlunya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang menyesuaikan bantuan pangan dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, mengatasi ketahanan pangan langsung dan tantangan sosial-ekonomi jangka panjang yang mereka hadapi (Bartelmeß et al., 2024; Lewis et al., 2022).

Tidak seperti bansos pada umumnya yang berfokus pada bantuan tunai atau pemberdayaan ekonomi, program permakanan secara langsung menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan siap saji yang bergizi, higienis, dan terstandar kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Program ini dirancang untuk menjangkau individu dengan keterbatasan fisik dan mental berat yang tidak dapat mengakses bantuan lain secara optimal. Oleh sebab itu, program ini berperan ganda: sebagai jaring pengaman dasar dan sebagai upaya pemulihan martabat melalui pemenuhan nutrisi yang layak. Kementerian Sosial RI, (2023) menjelaskan, bahwa ada enam kriteria disabilitas penerima manfaat permakanan, yaitu miskin atau tidak mampu, penyandang disabilitas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan atau purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang telah dipadankan dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, diusulkan camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penyandang disabilitas penerima bantuan sosial permakanan. Kriteria ini sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial mengenai permakanan tepat sasaran dan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga meningkatkan validitas program yang dievaluasi.

Sejumlah kajian menegaskan, bahwa efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada keakuratan data penerima, kesiapan infrastruktur distribusi, dan sistem monitoring yang efisien. Namun, evaluasi program bansos yang secara spesifik ditujukan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas dan belum terintegrasi secara nasional (Hermawati, 2021). Padahal kelompok ini memiliki kebutuhan yang sangat khas, sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang lebih sensitif dan adaptif terhadap konteks mereka. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya gap penting dalam literatur dan praktik, di mana penelitian terdahulu banyak fokus pada program bantuan sosial umum tanpa mengangkat kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Salah satu kegagalan utama dalam evaluasi program sebelumnya adalah kecenderungan untuk hanya menilai hasil (*outcome*) tanpa memperhatikan proses implementasi (*process*), yang penting untuk memahami tantangan teknis dan logistik yang dihadapi di lapangan. Evaluasi yang kurang memperhatikan aspek-aspek ini seringkali mengabaikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program, seperti kesiapan infrastruktur dan efektivitas distribusi. Penelitian oleh (Slater, 2011) dan (Cook et al., 2014) menunjukkan, bahwa banyak evaluasi program sosial hanya mengukur dampak langsung pada penerima manfaat, sementara proses distribusi dan implementasi seringkali diabaikan, meskipun ini adalah aspek yang menentukan efektivitas jangka panjang. Selain itu, (Sabates-wheeler & Devereux, 2007) menekankan bahwa evaluasi program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, harus mencakup penilaian menyeluruh terhadap proses operasional untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama implementasi, dan bukan hanya pada hasil akhir yang terukur. Selanjutnya, (Manusiwa et al., 2025; Oktarina et al., 2022) menegaskan, bahwa evaluasi program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, termasuk individu penyandang cacat, menekankan perlunya penilaian menyeluruh terhadap proses operasional untuk mengidentifikasi potensi hambatan implementasi. Dengan demikian, pendekatan evaluasi komprehensif yang mencakup hasil dan proses implementasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh (Stufflebeam et al., 2000) menawarkan kerangka evaluasi komprehensif untuk menilai program sosial secara sistematis, dengan menilai konteks, kesiapan input, efektivitas proses, serta hasil produk, yang membedakannya dari evaluasi konvensional yang hanya fokus pada output atau outcome. Pendekatan ini, meski belum banyak digunakan dalam evaluasi program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia, dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor keberhasilan dan kendala pelaksanaan yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan. Penekanan CIPP pada konteks sangat penting, karena penelitian implementasi menyoroti peran faktor kontekstual dalam keberhasilan intervensi. Misalnya, (Harvey, 2022) membahas tantangan dalam penerapan pemahaman kontekstual untuk meningkatkan praktik implementasi dalam perawatan kesehatan, menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap konteks dalam kerangka evaluasi. Hudon & Kessler (2023) juga menekankan pentingnya konteks dalam mengevaluasi intervensi kompleks, menunjukkan bahwa perspektif berbasis teori dan sistem sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Komponen proses CIPP dapat diperkuat dengan metodologi seperti Pemetaan Implementasi yang disarankan oleh (Schultes et al., 2022) untuk merancang dan mengevaluasi proses implementasi secara sistematis, memastikan kesesuaian dengan intervensi dan konteks. Evaluasi produk CIPP didukung oleh desain evaluasi ekonomi dalam Koperasi Pencegahan HEAL yang mengintegrasikan analisis efektivitas biaya, memberikan wawasan tentang keberlanjutan dan dampak intervensi (Dunlap et al., 2023). Kerangka evaluasi Proyek SCUBY, yang mencakup penilaian penerimaan, kelayakan, dan adaptasi, juga dapat menginformasikan evaluasi produk CIPP dengan menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan adaptasi kontekstual (Martens et al., 2022). Secara keseluruhan, model CIPP dapat mengatasi tantangan dalam mengevaluasi program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia, memberikan wawasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program.

Selaras dengan meningkatnya komitmen global terhadap inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan multidimensi (S. Mitra & Shakespeare, 2019), penelitian ini menambahkan pendekatan analisis pemodelan topik (*topic modeling*) untuk menelaah lebih dalam kendala dan saran perbaikan dari pelaksana program di lapangan. Kombinasi pendekatan kuantitatif dan tekstual ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan faktual sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan (Dinda Pramisita et al., 2023) (Gupta et al., 2024). Integrasi pemodelan topik dengan pendekatan kuantitatif dalam memahami kemiskinan multidimensi dan inklusi sosial adalah metode yang menjanjikan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian di berbagai negara, seperti Pakistan, China, dan Kolombia, menyoroti kompleksitas dan kekhususan regional kemiskinan yang memerlukan kebijakan yang disesuaikan. Di Pakistan, kemiskinan multidimensi lebih prevalen di daerah pedesaan dan rumah tangga dengan lebih banyak tanggungan, menunjukkan perlunya kebijakan yang mengatasi tantangan demografis ini (Saddique et al., 2023). Di China, penggunaan model berbasis data dan pembelajaran mesin terbukti efektif dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan kesenjangan regional dan perencanaan jangka panjang (Yang et al., 2022). Situasi di Kolombia menggarisbawahi kebutuhan akan kebijakan yang ditargetkan, terutama untuk rumah tangga dengan anggota disabilitas, yang memerlukan akses lebih besar ke pendidikan dan layanan inklusif (Pinilla-Roncancio & Cedeño-Ocampo, 2023). Selain itu, pengenalan Indeks Kemiskinan Multidimensi Moderat (MMPI) memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kemiskinan, yang dapat menginformasikan strategi pemberantasan kemiskinan yang lebih komprehensif (Alkire et al., 2023). Penerapan metodologi ini pada berbagai kelompok demografis, seperti lansia di China yang mendapat manfaat dari asuransi perawatan jangka panjang, menunjukkan potensi menggabungkan data kuantitatif dengan wawasan kualitatif untuk mengatasi kemiskinan yang beragam (Li et al., 2023). Pendekatan ini mendukung komitmen global terhadap inklusi sosial dan pemberantasan kemiskinan, serta memberikan kerangka kerja yang kuat untuk perbaikan kebijakan berbasis data dan informasi kontekstual (Righettini & Bordin, 2023).

Penelitian lokal juga memperlihatkan pentingnya peran bansos dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, khususnya di daerah pedesaan yang rentan secara ekonomi. Studi (Hermawati et al., 2024) di Kalurahan Ngargosari, Kulon Progo, dengan pendekatan *mixed methods* menemukan, bahwa bantuan sosial tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan, tetapi juga menangani masalah finansial keluarga. Meski demikian, efektivitas program masih memerlukan peningkatan melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat guna meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi gap empiris dan konseptual dalam evaluasi bansos penyandang disabilitas, tetapi juga menyediakan data dan analisis yang sangat relevan untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program serta mendukung upaya nasional dalam menjamin perlindungan sosial efektif bagi kelompok rentan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 menggunakan model CIPP. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dapat dinilai melalui keempat dimensi CIPP?, dan (2) Kendala apa saja yang dihadapi pelaksana di lapangan dan bagaimana strategi perbaikannya dapat dirumuskan?

Urgensi penelitian sangat tinggi karena penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga membutuhkan perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Tanpa evaluasi yang komprehensif, potensi masalah seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya kualitas layanan, dan hambatan teknis pelaporan dapat terus terjadi, memperburuk kesejahteraan kelompok rentan ini dan menghambat pencapaian tujuan inklusi sosial secara maksimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan informasi empiris valid dan relevan sebagai

dasar pengambilan keputusan, perbaikan program, dan pengembangan kebijakan bansos yang responsif dan inklusif demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei evaluatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024 dalam kerangka perlindungan sosial. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data numerik yang objektif dari berbagai responden di lapangan, serta analisis statistik yang akurat untuk menilai berbagai aspek pelaksanaan program (Creswell & Creswell, 2018). Selain itu, penggunaan instrumen dengan skala Likert memungkinkan evaluasi kualitatif dijabarkan dalam bentuk kuantitatif, sehingga mempermudah interpretasi dan generalisasi hasil (Fraenkel, Jack.R; Wallen, Norman E; Hyun, 2009; Likert, 1932). Pendekatan ini didukung oleh literatur evaluasi program sosial yang menekankan pentingnya data kuantitatif untuk memberikan gambaran obyektif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dalam konteks kebijakan publik. Sebagai contoh, (Kang et al., 2021) menekankan bahwa evaluasi kuantitatif mampu mengukur pencapaian tujuan program dengan lebih jelas, sementara (Stufflebeam et al., 2000) menunjukkan bahwa penggunaan kerangka CIPP dalam penelitian evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan program sosial. Pendekatan ini juga relevan dalam mengkaji perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, yang merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan terintegrasi agar dapat mengakses dan memanfaatkan bantuan sosial dengan optimal (Slater, 2011).

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh (Stufflebeam et al., 2000) digunakan dalam penelitian ini. Model CIPP dipilih karena memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai berbagai aspek dari pelaksanaan program sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Model ini tidak hanya menilai hasil (*output*) atau dampak program (*outcome*), tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, seperti konteks sosial dan kebijakan yang mendasarinya (*Context*), kesiapan dan ketersediaan sumber daya (*Input*), bagaimana program dijalankan (*Process*), dan apakah tujuan program tercapai dengan baik (*Product*). Pendekatan CIPP memberikan manfaat yang besar dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu program secara menyeluruh, yang sangat penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat (Stufflebeam et al., 2000). Evaluasi ini juga relevan dengan tujuan perlindungan sosial yang berfokus pada pemberdayaan dan pemberian akses yang setara kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas (Devereux & Sabates-wheeler, 2004).

Selain menggunakan model evaluasi CIPP, penelitian ini juga melibatkan analisis teks (*text analysis*) untuk mengekstrak informasi spesifik terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana di lapangan serta saran dan kendala yang diharapkan oleh pelaksana untuk memperbaiki kualitas program. Pemodelan topik adalah jenis pemodelan statistik yang menggunakan teknik *unsupervised machine learning* untuk mengidentifikasi gugusan atau kelompok kata serupa dalam isi teks. Untuk analisis ini, digunakan metode *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dengan *preprocessing* yang meliputi *stopwords removal*, *tokenization*, dan *stemming* untuk meningkatkan kualitas hasil pemodelan topik. Teknik ini sangat efektif untuk menganalisis data teks besar dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul berulang, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai masalah yang tidak terlihat dalam data kuantitatif biasa (Blei et al., 2002); (Andika et al., 2021; Matira & Setiawan, 2023).

Topic Modelling atau pemodelan topik merupakan metode yang cukup umum digunakan untuk segmentasi dan sistem rekomendasi dengan mengelompokkan sekelompok data yang memiliki karakteristik yang sama (Gupta et al., 2024). *Topic Modelling* sendiri merupakan bentuk dari model statistik yang digunakan pada *machine learning* dan *Natural Language Processing* (NLP) untuk

mengidentifikasi struktur tersembunyi dari kumpulan data atau teks (Egger & Yu, 2022) *Topic Modelling* memiliki fungsi untuk mengelompokkan kumpulan data atau teks menjadi beberapa topik. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk segmentasi produk dan pembuatan rekomendasi produk untuk stakeholder yang akan memberikan keuntungan jangka panjang. *Topic Modelling* dapat dibuat dengan berbagai metode seperti *Laten Dirichlet Allocation* (LDA), *Non-negative Matrix Factorization* (NMF), *Top2VEC*, dan *BERTopic* (Egger & Yu, 2022)

Lokasi penelitian ini mencakup 12 provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaksanakan program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas pada tahun anggaran 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada cakupan implementasi program yang mencakup berbagai daerah dengan karakteristik demografis dan geografis yang beragam. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai pelaksanaan program di berbagai jenis daerah, baik perkotaan maupun perdesaan, yang masing-masing memiliki tantangan dan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2024, untuk memperoleh data yang mencerminkan kondisi terkini mengenai pelaksanaan dan hasil program Bantuan Permakanan di Indonesia, sehingga hasil evaluasi relevan dengan kebijakan dan perencanaan jangka panjang yang sedang disusun oleh pemerintah (Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, 2024).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner yang telah disusun berdasarkan model evaluasi CIPP. Kuesioner tersebut mencakup indikator-indikator yang relevan untuk menilai keempat dimensi dari program: konteks, input, proses, dan produk. Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert 1-3 yang memungkinkan pengukuran yang lebih terstruktur mengenai persepsi responden terhadap pelaksanaan program. Penggunaan skala Likert 1-3 dipilih karena merupakan standar yang digunakan dalam pengukuran survei internal oleh Kementerian Sosial, yang lebih memfokuskan pada kesederhanaan dan kemudahan pemahaman bagi responden. Namun, untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi yang lebih luas, skala Likert 5 poin dapat dipertimbangkan untuk memberikan ruang diferensiasi yang lebih baik dan meningkatkan validitas statistik.

Responden terdiri dari kelompok masyarakat pelaksana (Pokmas), pendamping sosial, aparatur kecamatan, dan dinas sosial kabupaten/kota yang terlibat langsung dalam program Bantuan Permakanan. Selain kuesioner, data kualitatif diperoleh melalui laporan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim monitoring Direktorat RSPD. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dan wawasan terkait praktik implementasi yang tidak dapat dijangkau melalui kuesioner. Metode pengumpulan data ini memberikan kelebihan berupa kombinasi antara data numerik yang kuat dan narasi kualitatif yang menggambarkan dinamika pelaksanaan program secara lebih rinci (Simangunsong & Sihotang, 2023) ; (Creswell, JW & Clark, 2017).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu hanya menyertakan responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas dan yang dapat memberikan informasi yang relevan mengenai aspek-aspek yang akan dievaluasi dalam penelitian ini. Responden dipilih dari kelompok masyarakat pelaksana (Pokmas), pendamping sosial, aparatur kecamatan, dan dinas sosial kabupaten/kota yang tersebar di 12 provinsi dan 63 kabupaten/kota. *Purposive sampling* dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih responden yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait program yang dievaluasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan representatif untuk tujuan penelitian (Etikan, 2016; Palinkas et al., 2015)). Total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 306 orang, yang dipilih secara proporsional dari berbagai tingkatan pelaksana program.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung skor rata-rata untuk setiap indikator pada keempat variabel model CIPP, yang kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria baku untuk menilai keberhasilan dan kendala pelaksanaan program. Validitas instrumen diuji menggunakan

korelasi Pearson untuk memastikan kesesuaian setiap item dengan total skor, sementara reliabilitas diuji dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*, yang menunjukkan konsistensi tinggi pada $\alpha=0,890$ (Gliem & Gliem, 2003). Selain analisis kuantitatif, analisis teks dilakukan menggunakan teknik pemodelan topik (*topic modeling*) berbasis *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dan pembobotan *Term Frequency – Inverse Document Frequency* (TF-IDF), yang diterapkan untuk menggali tema-tema utama yang terkait dengan kendala dan saran yang disampaikan oleh pelaksana program. Teknik ini sangat efektif untuk menganalisis data teks besar dan mengidentifikasi pola atau kluster kata-kata yang muncul berulang, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai masalah yang tidak terlihat dalam data kuantitatif (Blei et al., 2002); (Jacobs & Tschötschel, 2019). Gabungan analisis kuantitatif dan analisis teks ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas.

3. Hasil Penelitian

3.1. Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 306 responden yang berperan sebagai pelaksana program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di 12 provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia. Responden terdiri dari beberapa kelompok utama, yakni kelompok masyarakat pelaksana (Pokmas), pendamping sosial, aparat kecamatan, dan dinas sosial di tingkat kabupaten/kota. Distribusi responden menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari Pokmas sebanyak 64%, yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan bansos di lapangan.

Distribusi responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Responden Penelitian

Unsur Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Kelompok Masyarakat (Pokmas)	196	64
Pendamping Sosial	89	29
Kecamatan	16	5
Dinas Sosial Kab/Kota	5	2
Total	306	100

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

3.2. Evaluasi Model CIPP dan Rincian Skor Tiap Indikator pada Variabel CIPP

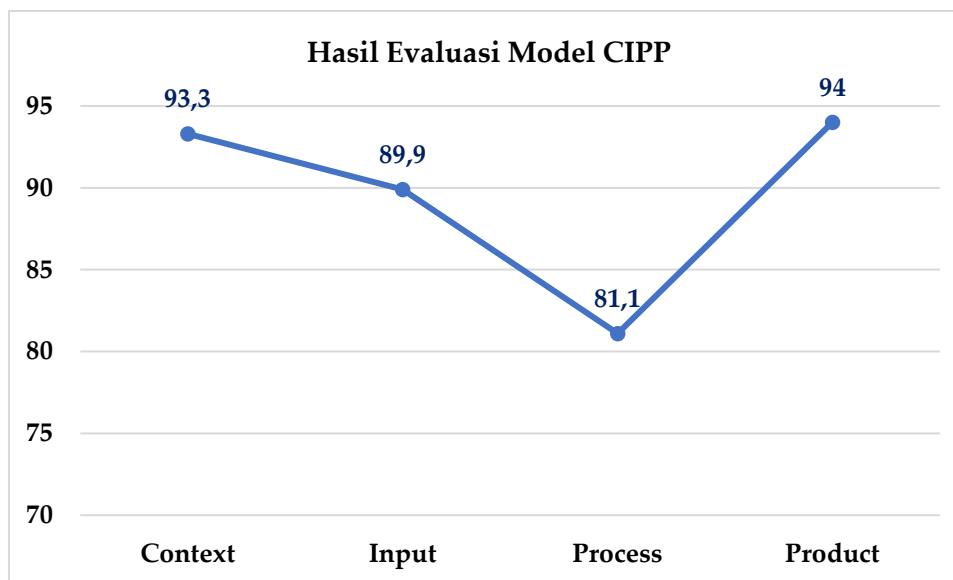
Evaluasi pelaksanaan program permakanan menggunakan model CIPP yang menilai aspek konteks, input, proses, dan produk program menunjukkan bahwa keseluruhan aspek dinilai baik oleh responden. Variabel produk mendapat nilai tertinggi 94%, menunjukkan hasil yang sangat positif dalam kualitas layanan dan penerimaan bansos. Variabel proses mendapatkan nilai terendah yakni 81,1%, mengindikasikan area yang masih membutuhkan perbaikan, khususnya terkait pelaporan dan layanan pengaduan. Distribusi hasil evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dapat disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model CIPP

Variabel	Skor Maksimal	Skor Rata-rata	Persentase (%)	Kategori
<i>Context</i>	918	856	93.3	Baik
<i>Input</i>	918	825	89.9	Baik
<i>Process</i>	918	745	81.1	Baik
<i>Product</i>	918	863	94.0	Baik

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

Secara visual, hasil evaluasi pelaksanaan program permakanan bagi difabel dengan model CIPP dapat disajikan pada Gambar 1. Data pada Gambar 1 menunjukkan skor rata-rata pada empat dimensi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), dengan produk memperoleh skor tertinggi (94) dan proses memperoleh skor terendah (81,1).



Gambar. 1. Skor Evaluasi CIPP pada Program Bantuan Permakanan.

Rincian skor per indikator mengungkapkan kekuatan dan kelemahan program secara lebih detail. Indikator pada variabel konteks seperti tujuan dan manfaat program mendapatkan skor tinggi di atas 90%, menunjukkan pemahaman yang baik di kalangan pelaksana. Pada variabel input, skor terkait anggaran bansos relatif lebih rendah (74,4%), menandakan perlunya kajian ulang terkait alokasi dana. Proses pelaksanaan menunjukkan nilai rendah pada pelaporan dan asistensi pengaduan di tingkat kecamatan, yang berkisar di bawah 70%. Sedangkan produk program, yang menilai aspek higienitas dan variasi menu serta kepuasan penerima manfaat, berada pada kategori sangat baik di atas 90%.

Rincian skor pada masing-masing indikator variabel CIPP adalah sebagai mana terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Skor Indikator Variabel CIPP

Variabel	Indikator	Skor	Persentase (%)	Kategori
<i>Context</i>	Latar Belakang Program	848	92.4	Baik
	Tujuan Program	871	94.9	Baik
	Manfaat Program	876	95.4	Baik
	Petunjuk Teknis Program	830	90.4	Baik
<i>Input</i>	Sosialisasi Program	825	89.9	Baik
	Pengetahuan Kriteria PM	851	92.7	Baik
	Waktu Konfirmasi Data	827	90.1	Baik
	Jumlah Anggaran Bansos	683	74.4	Cukup Baik
	Dukungan Direktorat RSPD	848	92.4	Baik
	Dukungan Dinas Sosial	843	91.8	Baik
	Dukungan Kecamatan	857	93.4	Baik
	Dukungan Pendamping Sosial	865	94.2	Baik
<i>Process</i>	Pembentukan Pokmas	786	85.6	Baik

Variabel	Indikator	Skor	Persentase (%)	Kategori
Product	Penyusunan Dokumen Swakelola	755	82.2	Baik
	Pendampingan Dokumen	803	87.5	Baik
	Registrasi Pokmas	789	85.9	Baik
	Waktu Pencairan Dana	730	79.5	Baik
	Waktu Pelaksanaan Program	764	83.2	Baik
	Monitoring dan Evaluasi	807	87.9	Baik
	Asistensi Pengaduan Dinas	789	85.9	Baik
	Asistensi Pengaduan Kecamatan	600	65.4	Cukup Baik
	Pelaporan Kegiatan	624	68.0	Cukup Baik
	Higienitas Pengemasan Makanan	892	97.2	Baik
	Kelengkapan Menu	896	97.6	Baik
	Variasi Menu Permakanaan	886	96.5	Baik
	PM Merasa Terbantu	900	98.0	Baik
	PM Memahami Nutrisi	856	93.2	Baik
	Perubahan Perilaku Positif	819	89.2	Baik
	PM Lebih Mandiri	792	86.3	Baik

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

3.3 Kendala Pelaksanaan Bansos Permakanaan Berdasarkan Pemodelan Topik

Pemodelan topik digunakan untuk mengidentifikasi tema utama kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Analisis menunjukkan lima klaster kendala utama, seperti hambatan pelaporan digital akibat sinyal buruk, proses pengiriman yang terhambat medan sulit dan jarak jauh, serta kendala biaya pengiriman. Identifikasi ini penting untuk memahami masalah praktis yang tidak selalu tampak dalam data kuantitatif biasa, dan membantu fokus perbaikan di area yang paling bermasalah.

Analisis topik terhadap kendala pelaksanaan mengelompokkan permasalahan utama dapat disajikan pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Bansos Permakanaan

Klaster Kendala	Deskripsi Singkat
Pelaporan	Kesulitan penggunaan aplikasi SIKSMA, sinyal buruk
Proses Pengiriman	Medan berat, jarak jauh, cuaca buruk
Ongkos Kirim	Biaya pengiriman dianggap kurang memadai
Tempat Makan ODGJ	Kendala lokasi khusus bagi orang dengan gangguan jiwa
Waktu Pengantaran	Ketidaksesuaian jadwal pengiriman dan ketersediaan penerima

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

Kendala-kendala tersebut menjadi fokus penting bagi perbaikan agar program dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

3.4 Saran Pelaksana Program Berdasarkan Pemodelan Topik

Analisis pemodelan topik terhadap data responden juga mengidentifikasi sejumlah saran utama dari pelaksana program di lapangan. Saran-saran ini menggambarkan harapan dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan Bantuan Permakanaan bagi

Penyandang Disabilitas. Berikut adalah klaster saran utama beserta frekuensi kemunculan kata kunci yang mendukung:

Tabel 5. Saran Pelaksana Program

Klaster Saran	Frekuensi Kata Kunci Terkait	Contoh Kata Kunci
Penambahan Kuota PM	24	“penambahan”, “penerima manfaat”, “kuota”
Keberlanjutan Program	15	“berlanjut”, “program terus”, “penerima”
Penyesuaian Ongkos Kirim	9	“ongkos kirim”, “biaya kurir”, “pengiriman”
Penambahan Dana	4	“penambahan dana”, “bantuan permakanan”, “biaya”

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

Tabel 5 di atas menunjukkan, bahwa mayoritas saran pelaksana terkait kebutuhan perluasan jumlah penerima manfaat, yang diikuti oleh keinginan agar program berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian biaya pengiriman dan penambahan dana operasional menjadi perhatian penting agar program dapat berjalan lebih efektif sesuai kondisi di lapangan. Narasi saran ini memberikan gambaran fokus perbaikan yang diharapkan oleh pelaksana di lapangan dan menjadi dasar penting untuk rekomendasi kebijakan yang lebih responsif.

3.5 Temuan Kunjungan Lapangan (Beberapa Contoh Kabupaten/Kota)

Kegiatan kunjungan lapangan memperkaya data kuantitatif dengan pengamatan dan wawancara langsung. Respon penerima manfaat pada berbagai kabupaten menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kualitas makanan dan manfaat ekonomi program. Namun, pelaksana melaporkan kendala teknis seperti aplikasi yang sering error dan keterbatasan jaringan, serta kesulitan logistik pada pengiriman di daerah tertentu. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan program pada tingkat operasional.

Data dan temuan menunjukkan bahwa program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas memberikan manfaat nyata bagi penerima dengan nilai gizi yang lebih baik dan perubahan positif perilaku. Meski demikian, terdapat kendala teknis dan logistik yang harus segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program. Temuan kunjungan lapangan dapat disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Temuan Kunjungan Lapangan

Lokasi	Respon Penerima Manfaat	Respon Pokmas/Pendamping Sosial
Kabupaten Bandung	Menu variatif, makanan tahan lama, kurir ramah	Sinyal buruk, aplikasi error, ongkos kirim perlu naik
Kabupaten Purwakarta	-	Butuh pendampingan pelaporan LPJ
Kota Pematang Siantar	Program bermanfaat, harapkan kelanjutan	Ongkos kirim minim, BOP kurang memadai
Kabupaten Mojokerto	Sangat membantu, nilai gizi lengkap	Data tidak akurat, aplikasi error, jarak pengiriman jauh
Kabupaten Nganjuk	Sangat bermanfaat untuk kebutuhan makan sehari-hari	Butuh penambahan kuota dan asupan gizi

Sumber: Analisa Data Primer, 2024

Secara keseluruhan, data hasil evaluasi dan temuan lapangan menunjukkan bahwa program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas memberikan dampak positif yang signifikan, namun beberapa kendala teknis dan logistik masih perlu mendapatkan perhatian serius agar manfaat program dapat semakin optimal dan merata.

4. Pembahasan

4.1. Pemahaman Konteks Program (Context)

Pemahaman yang mendalam terhadap konteks program merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas. Skor tinggi variabel konteks (93,3%) mencerminkan bahwa pemangku kepentingan di lapangan, termasuk pelaksana dan pendamping sosial, memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat program. Hal ini penting karena, menurut (Stufflebeam et al., 2000) evaluasi konteks membantu memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Dalam kerangka perlindungan sosial, pemahaman konteks ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya mencakup tujuan teknis program, tetapi juga pemahaman terhadap risiko sosial-ekonomi, ketidaksetaraan, dan kerentanan spesifik yang dialami oleh penyandang disabilitas. (Devereux & Sabates-wheeler, 2004) menegaskan bahwa konteks perlindungan sosial meliputi kondisi kerentanan dan tantangan struktural yang harus diatasi agar jaring pengaman sosial dapat berjalan efektif. Kesesuaian program dengan konteks sosial dan ekonomi lokal mempermudah integrasi bantuan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, teori komunikasi organisasi menggarisbawahi bahwa kesamaan pemahaman tujuan dan visi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan sosial (Robbins, 2003). Jika konteks program diterima dan dipahami dengan baik oleh semua aktor terkait, potensi resistensi dan kesalahan interpretasi dapat diminimalkan. Hal ini memastikan aktivitas program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Studi (A. Mitra & Tripathi, 2021) memperkuat hal ini dengan menunjukkan, bahwa keselarasan pemahaman konteks antara pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan sangat menentukan keberhasilan program bantuan sosial, terutama program yang menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Tanpa pemahaman konteks yang kuat, kebijakan perlindungan sosial cenderung gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sehingga manfaat program menjadi terbatas.

Dengan demikian, evaluasi konteks dalam model CIPP bukan hanya menguji apakah program telah sesuai dengan tujuan teknis, tetapi juga menilai bagaimana program merespon kebutuhan sosial-ekonomi yang spesifik, mengakomodasi kerentanan dan ketidakadilan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Pemahaman ini menjadi kunci agar program Bantuan Permakanan dapat menjadi intervensi yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan multidimensi di Indonesia.

4.2. Kesiapan Sumber Daya dan Dukungan (Input)

Skor tinggi pada variabel input (89,9%) mengindikasikan bahwa berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas tersedia dengan cukup baik. Ini meliputi sosialisasi program, dukungan pelaksanaan dari tingkat pusat hingga lapangan, serta alokasi anggaran yang memadai. Namun, evaluasi juga mengungkapkan adanya perbedaan persepsi terkait indeks bantuan sebesar Rp 30.000 yang dianggap kurang ideal di beberapa daerah dengan biaya hidup tinggi, khususnya yang memiliki kondisi geografis sulit dan tingkat kemahalan pangan yang signifikan. Skor anggaran yang rendah (74,4%) pada variabel Input menunjukkan bahwa alokasi dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional, terutama ongkos kirim yang tinggi di daerah-daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan saran pelaksana yang tercatat dalam Tabel 5, yang menyarankan penyesuaian ongkos kirim dan penambahan dana operasional untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan efektivitas program. Sintesis antara data

kuantitatif ini (skor anggaran 74,4%) dan temuan kualitatif dari pelaksana mengenai kebutuhan penyesuaian ongkos kirim dan penambahan dana menunjukkan bahwa kendala pada anggaran memengaruhi keberhasilan operasional dan distribusi bantuan secara signifikan.

Dalam kerangka perlindungan sosial, ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting sebagai modal dasar untuk menjalankan program yang efektif dan berkelanjutan. (Devereux & Sabates-wheeler, 2004) menegaskan bahwa dukungan input yang memadai, baik material maupun non-material, merupakan syarat fundamental dalam membangun jaring pengaman sosial yang kuat dan inklusif. Lebih lanjut, (Simangunsong & Sihotang, 2023) menambahkan bahwa adaptasi anggaran dan bantuan sosial yang responsif terhadap kondisi lokal, termasuk faktor ekonomi dan geografis, berperan menentukan keberhasilan dan dampak jangka panjang intervensi sosial.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi antar berbagai institusi sangat berkontribusi pada persepsi positif pelaksana dan efektivitas pelaksanaan program (Hasibuan, 2017). Kerjasama yang solid dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dinas sosial kabupaten/kota, kecamatan, serta pendamping sosial memudahkan proses distribusi dan pengawasan, sehingga memperkuat sistem perlindungan sosial secara menyeluruh.

4.3. Pelaksanaan Program dan Manajemen (Process)

Meskipun mendapatkan skor kategori baik (81,1%), evaluasi proses pelaksanaan program menunjukkan beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian, terutama pada pelaporan dan layanan pengaduan di tingkat kecamatan yang memiliki skor relatif rendah (65,4% dan 68%). Kendala ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi seperti sinyal buruk dan kurangnya pelatihan teknis bagi petugas di lapangan dalam menggunakan aplikasi pelaporan digital seperti SIKSMA. Keterbatasan infrastruktur ini, khususnya masalah sinyal, menjadi faktor kontekstual yang menghalangi manfaat teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan, untuk berfungsi secara optimal. Djatmiko et al. (2025) menegaskan, bahwa transformasi digital dapat mendorong inklusi sosial dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Penulis menekankan, bahwa Pemanfaatan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan *cloud computing* penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan publik. Dalam konteks perlindungan sosial modern, monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi kunci agar program bansos dapat memberikan perlindungan yang nyata dan responsif (Barrientos, 2013).

Koordinasi yang sinergis antara dinas sosial, kecamatan, kelompok masyarakat pelaksana, dan pendamping sosial sangat penting dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan dan pengawasan. (Carlsson & Brommels, 2022) menekankan, bahwa kolaborasi multi-stakeholder meningkatkan efektivitas program sosial dan memastikan program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang dinamis.

4.4. Dampak Program dan Manfaat bagi Penerima (Product)

Variabel produk mencatat skor tertinggi (94%) yang menunjukkan bahwa program Bantuan Permakanan memberikan dampak nyata berupa peningkatan kualitas asupan gizi dan higienitas makanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, program juga mendorong perubahan perilaku positif, termasuk pemahaman lebih baik tentang nutrisi dan pola makan sehat, serta meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat. Studi oleh (Rahma, 2022) menunjukkan, bahwa penerima manfaat mengalami peningkatan asupan nutrisi yang signifikan, terutama pada kelompok disabilitas miskin.

Dampak sosial-ekonomi dari program ini juga meluas ke masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dalam distribusi dan pengolahan makanan, memperkuat jaringan sosial ekonomi komunitas. Hasil ini menunjukkan, bahwa perlindungan sosial tidak sekadar penyediaan bantuan, tetapi juga pemberdayaan penerima sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas diri dan mengurangi ketergantungan jangka panjang.

4.5. Kendala Distribusi dan Logistik

Ada keterkaitan yang jelas antara temuan dalam evaluasi CIPP dan analisis pemodelan topik. Misalnya, kendala yang diidentifikasi dalam proses pelaksanaan (skor 81,1%), seperti pelaporan yang terhambat oleh sinyal buruk dan aplikasi yang sering error, sangat sesuai dengan temuan dalam kluster kendala pelaporan digital. Aspek pengiriman di daerah sulit, yang mencatatkan skor rendah dalam proses, juga tercermin dalam kendala pengiriman terkait medan berat dan jarak jauh. Skor rendah pada variabel anggaran bansos (74,4%) menunjukkan bahwa alokasi dana yang tidak memadai menjadi faktor penting yang memperburuk kendala logistik, terutama pada ongkos kirim yang tinggi dan distribusi di daerah dengan kondisi geografis sulit. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun hasil kuantitatif memberikan gambaran umum tentang efektivitas program, analisis topik memberikan wawasan lebih dalam terhadap masalah-masalah praktis yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif saja.

Analisis pemodelan topik mengungkap kendala utama pelaksanaan bansos terkait distribusi, seperti medan sulit, jarak jauh, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan ongkos kirim yang dianggap kurang memadai. Hambatan ini sesuai dengan teori hambatan akses pelayanan sosial yang menyebutkan bahwa faktor geografis dan biaya ekonomi merupakan penghalang signifikan akses kelompok rentan terhadap layanan publik (Andersen, 1995). Oleh karena itu, penyesuaian biaya operasional, termasuk ongkos kirim, sangat diperlukan agar program dapat menjangkau penerima manfaat secara tepat waktu dan lengkap. Perhatian khusus juga harus diberikan pada daerah-daerah dengan kondisi geografis berat agar jaring pengaman sosial tetap berfungsi efektif. Koordinasi dan dukungan teknis yang diperkuat akan membantu mengatasi hambatan tersebut dan menjaga kelancaran distribusi bansos.

4.6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penerapan model evaluasi CIPP dalam penelitian ini membuktikan efektivitasnya sebagai alat untuk mengevaluasi program sosial secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek konteks, input, proses, dan produk. Penggunaan pemodelan topik sebagai metode pelengkap memberikan dimensi kualitatif yang kaya, membuka wawasan lebih luas terhadap kendala dan saran di lapangan yang tidak terjangkau oleh analisis kuantitatif konvensional (Stufflebeam et al., 2000); (Egger & Yu, 2022; Gupta et al., 2024; Jacobs & Tschötschel, 2019; Matira & Setiawan, 2023; Stufflebeam et al., 2000)

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar kuat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas, khususnya dalam peningkatan dukungan teknis, penyesuaian indeks bantuan, penguatan sistem pelaporan digital, serta pengoptimalan logistik dan distribusi. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan prinsip pembangunan sosial berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan multidimensi yang menjadi fokus utama kebijakan sosial di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024 secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima manfaat. Variabel konteks, input, proses, dan produk yang dievaluasi melalui model CIPP memperoleh skor kategori baik, dengan hasil terbaik pada variabel produk yang mengindikasikan dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kemandirian penerima. Pemahaman yang kuat terhadap konteks dan dukungan sumber daya yang memadai menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan.

Meskipun demikian, hambatan teknis pada pelaporan dan layanan pengaduan serta kendala logistik seperti medan sulit dan ongkos kirim yang kurang memadai masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar program dapat berjalan lebih optimal. Pemodelan topik memperjelas

kendala tersebut sekaligus menyampaikan saran penting dari pelaksana yang menuntut penambahan kuota penerima, keberlanjutan program, dan peningkatan dana operasional.

Evaluasi ini menegaskan pentingnya pendekatan evaluasi yang komprehensif dan kontekstual dalam program perlindungan sosial, khususnya untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hasil penelitian menyediakan basis data empiris dan analisis kritis untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan bansos yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan, direkomendasikan agar program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaksana program, terutama dalam penggunaan aplikasi pelaporan digital, harus menjadi prioritas untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi monitoring. Kedua, penyesuaian indeks bantuan pangan perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi harga lokal dan geografis agar nilai bantuan tetap efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi penerima. Selain itu, peningkatan dana operasional dan ongkos kirim sangat penting untuk mengatasi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan medan sulit.

Ketiga, perluasan cakupan penerima manfaat yang belum terdata secara tepat harus segera dilakukan dengan verifikasi dan sinkronisasi data yang lebih ketat, sehingga bantuan sosial menjadi lebih inklusif dan menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan. Keempat, penguatan koordinasi lintas sektor antara Direktorat RSPD, dinas sosial, kecamatan, dan kelompok masyarakat pelaksana sangat diperlukan agar distribusi, pengawasan, dan pelaporan program berjalan optimal dan transparan. Terakhir, evaluasi program secara rutin dan berkelanjutan menggunakan metode evaluasi komprehensif seperti CIPP dan teknik pemodelan topik harus menjadi bagian integral dari pengelolaan program, guna memastikan program bansos senantiasa responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lapangan.

Ucapan terimakasih: Terima kasih disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi riset kebijakan sosial, Direktur Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia atas fasilitasi dana monitoring dan evaluasi yang diberikan, Pelaksana program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di 12 provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia atas kerjasama dan data yang diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penulis dari Direktorat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Yogyakarta atas kontribusi data, wawasan kebijakan yang memperkaya analisis dan dukungan teknis serta asistensi dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga diberikan kepada para reviewer yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan naskah.

Daftar Pustaka

- Alkire, S., Kövesdi, F., Scheja, E., & Vollmer, F. (2023). Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the Way Out of Poverty. In *Social Indicators Research* (Vol. 168, Issues 1–3). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5>
- Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low-And middleincome countries: A systematic review. *PLoS ONE*, 12(12), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996>
- Barrientos, A. (2013). The Rise of Social Assistance in Brazil. *Development and Change*, 44(4), 887–910. <https://doi.org/10.1111/dech.12043>
- Bartelmeß, T., Jasiok, S., Kühnel, E., & Yildiz, J. (2024). Corrigendum: A scoping review of the social dimensions in food insecurity and poverty assessments. *Frontiers in Public Health*, 12(2). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1490591>

- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. T. (2002). Latent dirichlet allocation. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 3, 993–1022.
- Convention on the Rights of Persons With Disabilities (2006).
<https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- Cook, S., Pincus, J., Cecchini, S., & Carpenter, K. (2014). Policy Focus on “Building Social Protection Systems in Southeast Asia”, edited by Jonathan Pincus. *Journal of Southeast Asian Economies*, 31(1).
- Creswell, JW & Clark, P. V. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Helen Salmon (ed.); Fifth). SAGE Publications, Inc.
- Devereux, S., & Sabates-wheeler, R. (2004). *Transformative social protection for Africa ' s children IDS Working Paper 232 Transformative social protection. January 2004.*
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2015). Graduating from social protection? Editorial introduction. *IDS Bulletin*, 46(2), 1–12. <https://doi.org/10.1111/1759-5436.12124>
- Dinda Pramisita, A. A., Nyoman Saskara, I. A., Marhaeni, A. A. I. N., & Wiwin Setyari, N. P. (2023). Analysis of the Effectiveness and Impact of Cash Social Assistance of the Covid-19 Pandemic on Consumption Expenditures of Poor Households (Muslim Majority) in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 527–546.
<https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2242>
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI. (2024). *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas.*
- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 17(7), 1–28.
<https://doi.org/10.3390/su17072908>
- Dunlap, L. J., Kuklinski, M. R., Cowell, A., McCollister, K. E., Bowser, D. M., Campbell, M., Fernandes, C. S. F., Kemburu, P., Livingston, B. J., Prosser, L. A., Rao, V., Smart, R., & Yilmazer, T. (2023). Economic Evaluation Design within the HEAL Prevention Cooperative. *Prevention Science*, 24(0123456789), 50–60. <https://doi.org/10.1007/s11121-022-01400-5>
- Fraenkel, Jack.R;Wallen, Norman E; Hyun, H. H. (2009). *How to Design and Evaluate Research in Education* (Eighth). Mc Graw Hill.
- Groce, N., Kett, M., Lang, R., & Trani, J. F. (2011). Disability and poverty: The need for a more nuanced understanding of implications for development policy and practice. *Third World Quarterly*, 32(8), 1493–1513. <https://doi.org/10.1080/01436597.2011.604520>
- Hadfield-Spoor, M., Avendano, M., & Loopstra, R. (2022). Food insecurity among disabled adults. *European Journal of Public Health*, 32(4), 593–599. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac034>
- Harvey, G. (2022). Context Matters, So How Do We Get Better at Working With Context in Implementation Research and Practice? Comment on “Stakeholder Perspectives of Attributes and Features of Context Relevant to Knowledge Translation in Health Settings: A Multi-country Anal. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(8), 1587–1589.
<https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.7088>
- Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A. S., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari,

- Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(03), 202–293. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3501>
- Hernández-Vásquez, A., Bartra Reátegui, A., Sánchez-Dávila, K., & Vargas-Fernández, R. (2023). Association between Disability and Unmet Food Needs in the Venezuelan Migrant and Refugee Population: Analysis of a Population-Based Survey, 2022. *Nutrients*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/nu15071663>
- Hudon, C., & Kessler, R. (2023). Integrating case management for patients with complex needs in the ground practice: the importance of context in evaluative designs. *Health Research Policy and Systems*, 21(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s12961-023-00960-4>
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Bantuan Permakanan Diberikan untuk Lansia Tunggal dan Disabilitas Tunggal*. <https://kemensos.go.id/index.php/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>
- Lewis, E., Mitra, S., & Yap, J. (2022). Do Disability Inequalities Grow with Development? Evidence from 40 Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095110>
- Li, W., Ke, J., & Sun, F. (2023). Long-term care insurance and multidimensional poverty of middle-aged and elderly: Evidence from China. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1100146>
- Likert, R. (1932). *A technique for measurement of attitudes*. *Archives of Psychology*.
- Manusiwa, M. F., Laurens, S., & Madubun, J. (2025). *Analisis Kebijakan Alokasi Anggaran Daerah Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku*. 6(3), 1986–1995.
- Martens, M., Wouters, E., Van Olmen, J., Klemenc Ketiš, Z., Chhim, S., Chham, S., Buffel, V., Danhieux, K., Stojnić, N., Zavrnik, C., Poplas Susič, A., Van Damme, W., Ir, P., Remmen, R., Ku, G. M. V., Klipstein-Grobusch, K., & Boateng, D. (2022). Process evaluation of the scale-up of integrated diabetes and hypertension care in Belgium, Cambodia and Slovenia (the SCUBY Project): A study protocol. *BMJ Open*, 12(12), 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062151>
- Oktarina, V., Karlina, N., & Candradewini. (2022). Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Department of Public Administration , Faculty of Social and Political Sciences This Research Is Motivated By A Phenomenon Where There Are Many Poor People. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1).
- Pinilla-Roncancio, M., & Cedeño-Ocampo, G. (2023). Multidimensional poverty among persons with disabilities in Colombia: Inequalities in the distribution of deprivations at the municipality level. *PLoS ONE*, 18(6 June), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286983>
- Rahma, R. (2022). Efektivitas Program Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Abstrak. *Anterior Jurnal*, 22(Special issue), 134–140. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior>
- Righettini, M. S., & Bordin, E. (2023). Exploring food security as a multidimensional topic: twenty years of scientific publications and recent developments. *Quality and Quantity*, 57(3), 2739–2758. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01452-3>
- Sabates-wheeler, R., & Devereux, S. (2007). *Social Protection for Transformation*. 38(3), 23–28.
- Saddique, R., Zeng, W., Zhao, P., & Awan, A. (2023). Understanding multidimensional poverty in pakistan: implications for regional and demographic-specific policies. *Environmental Science and Pollution Research, Sharma 2019*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-28026-6>
- Schuelke, L., Munford, L., & Morciano, M. (2022). Estimating the additional costs of living with a

- disability in the United Kingdom between 2013 and 2016. *European Journal of Health Economics*, 23(2), 313–327. <https://doi.org/10.1007/s10198-021-01366-1>
- Schultes, M. T., Albers, B., Caci, L., Nyantakyi, E., & Clack, L. (2022). A Modified Implementation Mapping Methodology for Evaluating and Learning From Existing Implementation. *Frontiers in Public Health*, 10(March), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.836552>
- Slater, R. (2011). Cash transfers, social protection and poverty reduction. *International Journal of Social Welfare*, 20(3), 250–259. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00801.x>
- Stufflebeam, D. L., Madam, C. F., & Kellaghan, T. (2000). Evaluation Models: Chapter 16. The CIPP Model for Evaluation. *Kluwer Academic Publishers*, 279–317. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F0-306-47559-6_16
- Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2011).
- Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Wang, X., Guo, J., & Li, H. (2023). Multidimensional poverty of persons with disabilities in China: An analysis of poverty reduction effect of employment services. *Frontiers in Public Health*, 11(2). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1093978>
- Yang, D., Luan, W., Yang, J., Xue, B., Zhang, X., Wang, H., & Pian, F. (2022). The contribution of data-driven poverty alleviation funds in achieving mid-21st-Century multidimensional poverty alleviation planning. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01180-x>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).